

Vocal Point: Komunikasi Transformatif dalam Desa Melek Politik

Susilastuti DN, Basuki Agus Suparno dan Adi Soeprapto
Program Studi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta
Email: susilastuti_dn@yahoo.com

Abstract

Politics is not only about participating to vote in general election, but also transforming what the constitution provides a mandate in realizing to the nation state's dream. Therefore, politics must be articulated and must be conducted at any stages and levels of development including in the villages in triggering them to participate and involve at any kind of development programs. This research was devoted much time to realize a genuine of idea what we called it as Desa Melek Politik (Politics Literacy for Rural) in Desa Sendangsari Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman. Desa Melek Politik is a term that was used to describe a collaboration among parties who has been creating specific condition in a village that the politics as activities is very familiar and a close for them. Because of it, they can spend much time to participate and involve at any kind of programs were dedicated for people's prosperous. By participatory research, this is successful creating a vocal point that refer to an agent who will disseminate, communicate and transform the ways and political directions in the village especially in Desa Sendangsari more productive and constructive tones. These resulst have been accepted and officially appreciated by local government that will ensure the available vocal point in Desa Sendangsari will be giving much advantages for a village.

Keywords: *Vocal point, Desa Melek Politik, politics, village ,participation*

Abstrak

Politik tidak hanya tentang berpartisipasi memberikan suara pada pemilihan umum tetapi juga untuk menstranformasikan apa yang konstitusi mandatkan dalam mewujudkan cita-cita negara. Oleh karena itu politik harus diartikulasikan dan dijalankan pada semua level di desa-desa dengan mendorong mereka berpartisipasi dan terlibat dalam segala bentuk program pembangunan. Penelitian ini memfokuskan pada gagasan "genuine" tentang Desa Melek Politik di Desa Sendangsari Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman. Desa Melek Politik merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kolaborasi beberapa pihak yang telah menciptakan kondisi-kondisi tertentu yang menjadikan politik sebagai aktivitas adalah sesuatu yang akrab dalam kehidupan di desa. Karenanya, mereka menggunakan banyak waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang didedikasikan bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui riset partisipatif, penelitian telah berhasil menciptakan vocal point yang merujuk pada aktor yang akan mendiseminasikan dan mengkomunikasi cara dan arah politik di desa khususnya di Desa Sendangsari agar menjadi lebih produktif dan konstruktif. Pembentukan Vocal Point telah diterima masyarakat desa dan diapresiasi oleh pemerintah kabupaten sebagai kelompok masyarakat yang akan memberi kemanfaatan dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasi pembangunan.

Kata kunci: Vocal point, Desa Melek Politik, Politik, Desa, Patisipasi

Pendahuluan

Secara sempit politik sering dipersepsikan sebagai aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pemilihan umum. Hiruk pikuk yang menggambarkan dinamika kehidupan politik diperlihatkan dari *event* periodik ini. Melalui pemilihan umum, masyarakat menyaksikan sorak sorainya para kandidat dan partai politik yang saling bersaing. Ada warna warni partai politik dan kandidat yang menjanjikan sesuatu. Bahkan praktek-praktek politik uang pun menjadi fenomena yang menyertai.

Sesungguhnya politik bukan semata-mata tentang pemilihan umum, kampanye, janji politik, atau pencitraan kandidat. Politik lebih dari itu, yang mencakup proses pengambilan keputusan, mengalokasi sumber daya kekuasaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Semua itu merupakan bagian dari aktivitas politik yang mempunyai kedekatan dengan masyarakat.

Persoalannya adalah bagaimana mengubah perseptual buruk terhadap politik dan membawa persoalan politik menjadi lebih santun dan bermartabat. Dari hasil penelitian yang dilakukan Susilastuti, Suparno dan Suprpto (2014) menunjukkan kecenderungan penilaian negatif terhadap politik. Persepsi publik khususnya persepsi pemilih pemula terhadap politik mencakup penilaian sebagaimana berikut: politik uang, korup, konflik dan kegaduhan, serta kualitas kepemimpinan yang mandul.

Dasar dari penelitian ini adalah keinginan melakukan perubahan perseptual masyarakat terhadap politik yang dipersepsikan secara terbatas, sempit dan pesimis. Dalam catatan penelitian yang pernah dilakukan Susilastuti, Suparno, dan Soeprpto, (2014 dan 2015), dijelaskan bahwa meskipun persepsi negatif ini sangat kuat sebagai kognisi sosial, ternyata tetap ada harapan bahwa persepsi buruk terhadap politik bisa berubah dan dapat diubah yang baik. Harapan ini dibebankan dan bertumpu pada pendidikan politik.

Beberapa pihak dari akademisi, komisioner KPU dari semua Kabupaten di wilayah DIY, KPU DIY, KPU Pusat, Partai Politik, mahasiswa, aktivis,

media, dan para guru yang berasal dari beberapa jenjang sekolah yang merupakan subjek dalam penelitian menyakini bahwa pendidikan politik mampu menggeser dan mengubah kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan persepsi buruk terhadap politik.

Pemetaan terhadap perilaku politik yang dicerminkan pada cara-cara masyarakat menggunakan hak pilihnya pun memunculkan karakteristik tertentu yang tidak semuanya menggembirakan. Pertama, pemilih yang fanatik yang merupakan kelompok pemilih yang didasarkan pada orientasi inklusif, biasanya bersifat ideologis, sehingga tidak kritis. Kedua, pemilih yang apatis yang merasa memilih atau tidak, tidak berkaitan dengan kepentingan dan perubahan bagi diri mereka. Ketiga pemilih yang skeptis yang menyangksikan kemanfaatan dari pemilihan umum itu (Suparno dan Susilastuti, 2015). Penjelasan tersebut menimbulkan kekuatiran terhadap nasib masa depan masyarakat terutama kepedulian mereka terhadap proses-proses pembangunan dan partisipasi mereka.

Hasil penelitian mencuatkan kenyataan bahwa perilaku pemilih tidak berkaitan dengan pertimbangan rasional. Dengan perkataan lain, status sosial yang tinggi, tidak berkorelasi dengan perilaku politik yang cerdas. Dari sini kemudian muncul variabel kedua yang menjadi harapan bagi perubahan dan perbaikan terhadap kualitas kehidupan politik masyarakat, yakni pemuda dan atau pemilih pemula, selain berharap pada pendidikan politik yang berkualitas yang telah disebutkan.

Pemuda atau pemilih pemula merupakan individu atau entitas sosial yang masih dan terus berkembang. Pemilih pemula dalam interaksinya di tengah keluarga, lingkungan sekolah, pergaulan maupun terpaan media, menyerap sejumlah informasi tentang politik. Sementara di masyarakat tersedia informasi *tacit knowledge* yang merupakan asumsi-asumsi, nilai-nilai, batasan moral dan idealisme, batasan-batas kepantasan, kearifan dan harapan-harapan bersama, yang mengendap dalam alam bawah sadar masyarakat. Pengetahuan yang bersifat

tacit ini akan menjadi *explicit knowledge* ketika dipicu oleh hal-hal tertentu yang mendesaknya sehingga membentuk perilaku mereka dalam mensikapi isu-isu politik, kebijakan, program-program pembangunan termasuk dalam merespon pelaksanaan pemilu.

Informasi-informasi politik yang disampaikan kepada pemilih pemula pada dasarnya berproses secara *nature* (alamiah). Informasi politik yang berproses secara alamiah inilah yang menghasilkan *tacit knowledge*. Selain itu informasi politik yang berproses secara *nurture (by design)* yang akan menjadi *explicit knowledge*. Kedua proses ini akan membentuk satu pemahaman tentang politik.

Proses pendidikan yang bersifat *nature* dan *nurture* pada gilirannya mengarahkan pada urgensi dan relevansi muatan/isi pesan dalam pendidikan politik. Di tengah carut marut informasi tentang politik dan perilaku politik yang buruk, informasi politik idealnya mencakup persoalan ideologi dan hukum dasar serta bagaimana sebuah proses kebijakan pembangunan bangsa ini disusun. Konten-konten ini bisa dieksplisitkan berdasarkan kultur di masing-masing daerah. Dalam kenyataannya, produksi pesan politik yang sebagian besar dapat dilihat melalui media, mempertontonkan wajah buruk tentang politik secara keseluruhan.

Disebabkan pendidikan menjadi harapan bagi perubahan, maka tujuan utama pendidikan politik bukan hanya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu dari berbagai level (DPR, DPRD Propinsi/Kota/Kabupaten, DPD, Pemilu Presiden atau Pilkada bahkan tingkat pemilihan kepala desa) tetapi lebih merupakan upaya pembentukan kesadaran sebagai warga negara. Mereka pada gilirannya akan menjadi ujung tombak dan juru bicara bagi pembangunan bangsa di mulai dari level pemerintahan yang paling bawah yakni pemerintahan desa.

Dari permasalahan yang begitu mendasar itu, maka tulisan dari hasil penelitian ini berkepentingan untuk menginformasikan hasil implementasi model pengembangan pendidikan politik yang sudah dilakukan oleh peneliti pada

tahun-tahun sebelumnya yang menjadi titik tolak bagi pengembangan model pendidikan politik dengan mewujudkan Desa Melek Politik. Wujud implementasi ini diwujudkan dengan perintisan berdirinya Desa Melek Politik yang diresmikan pada akhir tahun 2016.

Desa Melek Politik merupakan istilah yang lahir dari praktek-praktek diskursif dari berbagai pihak seperti pemerintah Desa, KPU Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kabupaten Sleman. Dalam level operatif perintisan ini melibatkan stakeholder di tingkat desa, yang mencakup Kepala Desa, Karangtaruna, tokoh-tokoh masyarakat desa dan kelompok-kelompok sosial yang berperan dan berpengaruh yang merupakan modal bagi bekerjanya unsur Desa yang sadar politik ini.

Desa sadar politik ini telah menjadi percontohan pendidikan politik pada pemilih pemula yang memiliki dimensi yang sangat luas yang tercermin dari permasalahan pokok dalam penelitian berbasis *action research* ini, yakni: (1) Bagaimana mengimplementasikan pengembangan model pendidikan politik bagi pemilih pemula dalam rangka memperbaiki kualitas pengetahuan politik bagi masyarakat desa ? dan (2) Bagaimana bentuk pendidikan politik bagi pemilih pemula yang mampu membentuk kesadaran sebagai warga negara yang terlibat dalam kegiatan pembangunan di desa?

Pendidikan pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk mendidik insan manusia untuk mempunyai pengetahuan atas suatu yang akan membentuk sikap atau perilakunya atas suatu hal. Pendidikan sebagaimana tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan diri, masyarakat, bangsa dan negara.

Paulo Freire (1996:ix) merumuskan hakikat pendidikan dalam suatu dimensi yang

sifatnya sama sekali baru. Pendidikan haruslah berorientasi kepada pengenalan realitas dan diri sendiri. Pengenalan itu tidak cukup bersifat objektif atau subjektif, tetapi harus kedua-duanya. Kebutuhan objektif untuk mengubah keadaan yang tidak manusiawi, yang selalu memerlukan kemampuan subjektif (kesadaran subjektif) untuk mengenali lebih dahulu keadaan-keadaan yang tidak manusiawi

Dalam relasi semacam ini, segi kompetensi dan kualifikasi subjek penyampai pesan, kesadaran subjek penerima pesan, dan relevansi isi pesan dalam proses pendidikan menjadi sangat penting dan vital (Lawson-Tancred, 1991: 74). Setiap orang memiliki kemampuan etis dalam mempengaruhi orang lain dalam cara-cara komunikasi yang dapat diterima oleh orang lain untuk mengubah persepsi dan pandangan yang sebelumnya ia terima (Planalp and Ftiness, 2011:138). Proses-proses komunikasi menjadi situasi penting yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan proses pendidikan dan perubahan perilaku individu.

Sistem pendidikan yang mapan selama ini dapat diandaikan sebagai sebuah bank (*banking concept of education*) di mana peserta didik diberi pengetahuan agar kelak mendatangkan hasil berlipat ganda. Peserta didik adalah objek investasi dan sumber deposito potensial. Mereka tidak berbeda dengan komoditas ekonomi. Anak didik pun diperlakukan sebagai bejana kosong yang akan diisi sebagai penanaman modal ilmu pengetahuan yang akan dipetik hasilnya kelak. Fakih (2000:92) menjelaskan bahwa pendidikan adalah proses “produksi” kesadaran kritis, seperti menumbuhkan kesadaran kelas, kesadaran gender maupun kesadaran kritis lainnya. Pendidikan merupakan suatu sarana untuk “memproduksi” kesadaran dan mengembalikan kemanusiaan, dan dalam kaitan ini, pendidikan berperan membangkitkan kesadaran kritis sebagai prasarat upaya untuk pembebasan.

Kemuliaan dari tujuan pendidikan adalah melakukan refleksi kritis, terhadap sistem dan ‘ideologi yang dominan’ yang tengah berlaku di masyarakat, serta memperbaiki sistem tersebut

untuk memikirkan sistem alternatif kearah transformasi sosial menuju suatu masyarakat yang adil. Keinginan untuk melakukan perubahan terhadap persepsi negatif terhadap politik merupakan bagian dari tujuan pendidikan yang bertumpu melalui proses-proses komunikasi.

Aspek ini dimanifestasikan dalam bentuk kemampuan menciptakan ruang agar muncul sikap kritis terhadap sistem dan struktur ketidakadilan sosial, serta melakukan dekonstruksi terhadap diskursus yang dominan dan tidak adil menuju sistem sosial yang lebih adil. Pendidikan tidak mungkin dan tidak bisa netral, obyektif maupun “*detachment*” dari kondisi masyarakat. Gagasan pendidikan kritis, sebagaimana yang dilansir Azra (2006) merupakan salah satu prasyarat penting bagi pertumbuhan sistem politik demokrasi, mengingat di dalamnya terdapat proses transformasi realitas, termasuk realitas politik yang pada gilirannya bertujuan membentuk masyarakat sipil (*civil society*). Menurut Azra terdapat setidaknya dua dimensi dalam pendidikan kritis. Pertama, dimensi internal yang berkaitan dengan dunia pendidikan itu sendiri, kelembagaan, kandungan atau muatan pendidikan, dan terakhir proses-proses pendidikan yang berlangsung di dalamnya. Kedua, dimensi eksternal yang berkaitan dengan kondisi di luar pendidikan yang bagaimana pun mempengaruhi dunia pendidikan secara keseluruhan.

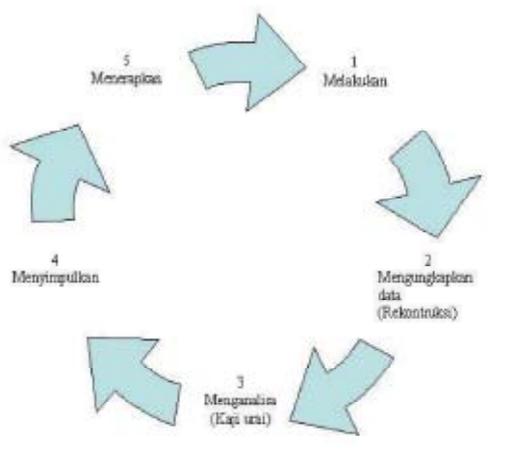
Pendidikan merupakan tempat untuk mendiskusikan masalah-masalah politik dan kekuasaan secara mendasar, karena pendidikan menjadi ajang terjalannya makna, hasrat, bahasa dan nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan yang tidak lain merupakan proses-proses komunikasi ini untuk mempertegas keyakinan secara lebih mendalam cita-cita moral.

Sebagai sebuah dasar untuk melakukan perubahan, pendidikan merupakan tindakan menggabungkan antara rekayasa politik dan upaya untuk menciptakan berbagai alternatif kehidupan yang baru. Pendidikan juga menjadi ajang untuk menuangkan komitmen yang tinggi dari para pendidik guna menciptakan sistem politik yang emansipatif, bukan sekedar

memenuhi tuntutan pedagogis semata.

Keterjalinan ini akan semakin kuat dan utuh ketika pola-pola pendidikan dikuatkan oleh perilaku belajar. Pendidikan mensyaratkan adanya perilaku belajar yang aktif. Belajar adalah sebuah bentuk penemuan kembali, penciptaan kembali dan penulisan kembali. Perilaku belajar berarti memikirkan pengalaman, sedangkan memikirkan pengalaman adalah cara terbaik untuk berpikir secara benar.

Adapun proses belajar (daur belajar) dalam pendidikan kritis dapat digambarkan sebagai berikut (Safe'i, 2006) :



Gambar.1. Pendidikan Politik dan Komunikasi Transformatif Kesadaran Bernegara

Pendidikan politik sering rancu dengan pendidikan pemilih yang selama ini dilakukan menjelang pemilihan umum. Pendidikan politik mempunyai tujuan untuk membentuk masyarakat mempunyai kesadaran sebagai warga negara.

Pendidikan politik bertujuan untuk membangun sebuah ikatan yang kokoh antara masyarakat dan negara (dalam hal ini semua komponen yang ada dalam negara) sehingga akan muncul sebuah relasi yang saling menguatkan. Itulah kenapa, terbentuknya Desa Melek Politik dengan kader-kadernya yang merupakan Vocal Point sebagai komunikator transformatif bagi pendidikan politik merupakan prestasi bersama di desa Sendangsari Kabupaten Sleman.

Metode Penelitian

Participatory Action Research (PAR) (Reason dalam Guba and Lincoln, 1994) merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan ruang baru dan rekayasa sosial, dalam konteks ini adalah perintisan pembentukan Desa Melek Politik di Desa Sendangsari Kabupaten Sleman. Perintisan ini dilakukan melalui proses-proses komunikasi dalam pendidikan politik masyarakat yang mandiri.

Penelitian ini memberi penekanan pada subyek yang diteliti untuk melakukan, memproduksi dan melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan memberdayakan dan mencerahkan mereka melalui pendampingan dan keterlibatan peneliti di dalam proses-proses produksi sosial tersebut. Seperti yang dikatakan Reason (1994:328) bahwa penelitian partisipatoris berimplikasi pada usaha masyarakat untuk memahami peran pengetahuan sebagai instrumen kekuasaan dan kontrol. Tujuan utamanya adalah *enlightment and awakening of common people*, melakukan pencerahan dan membangunkan masyarakat dengan tindakan yang mereka lakukan bersama dengan peneliti.

Penelitian tindakan partisipatif bermula dari pandangan adanya posisi masyarakat yang berdaya dan tidak berdaya, berpengetahuan dan tidak berpengetahuan, berketrampilan dan tidak berketrampilan, mandiri dan ketergantungan. Dengan posisi ini, peneliti terlibat dalam tindakan-tindakan tertentu untuk melakukan pencerahan dan pemberdayaan yang kemanfaatannya akan dirasakan dalam jangka panjang bagi kelompok masyarakat itu sendiri.

Dari aspek yang lain disebutkan bahwa dengan melalui penelitian tindakan partisipatif para peneliti akan merasakan dinamika kehidupan masyarakat secara langsung sebagai *lived experience* dari orang-orang yang diteliti, gagasan yang tercermin dari pengalaman aktual. Dengan demikian penelitian tindakan partisipatif adalah penelitian di mana para peneliti merasakan, menikmatinya dan memahaminya sebagai realitas (Reason, 1994: 328)

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan mencakup: desain riset, pengumpulan data, analisis data dan pada tahap berikutnya memunculkan proses-proses kolaboratif dan dialog yang memberdayakan, memotivasi, meningkatkan *self esteem* dan mengembangkan solidaritas komunitas. Menurut de Roux (1991) tahapan tersebut mencakup level rasional dan level emosional.

Pertemuan-pertemuan dengan komunitas dan peristiwa-peristiwa dengan berbagai macam jenisnya adalah bagaian penting dari PAR, menyajikan identifikasi terhadap isu-isu yang ada, menyatakan kembali kepekaan terhadap komunitas dan menekankan potensi yang membebaskan dan memberdayakan, memiliki kepekaan dalam mengumpulkan informasi, kemampuan melakukan perkembangan terhadap proyek dan mengembangkan kemampuan komunitas untuk melanjutkan proses-proses pembangunan.

Dalam keterlibatan peneliti terhadap sejumlah kegiatan yang ada, peneliti memanfaatkan dongeng, sosiodrama, permainan, wayang, lagu, menggambar, melukis dan aktivitas lainnya untuk memvalidasi data yang diperoleh. Semua forum yang relevan, berguna dalam merumuskan terbentuknya jenis dan model pemberdayaan. Pada tahap berikutnya, peneliti mengadakan pertemuan-pertemuan yang mendialogkan bagaimana sebaiknya dan program-program apa yang dapat dilakukan berdasarkan pada temuan data sebelumnya.

Dengan perkataan lain, aksi dan tindakan partisipatif seperti yang telah disebutkan itu, peneliti mengembangkan program kepentingan pemberdayaan bagi masyarakat. Dari langkah-langkah inilah kemudian menghasilkan Desa Melek Politik dan terbentuknya Vocal Point sebagai komunikator dalam pendidikan politik masyarakat yang mandiri di desa tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Persepsi Buruk terhadap Politik

Politik seringkali dipahami sebagai sesuatu yang jahat, kejam dan kotor sehingga

tidak setiap orang yang bersedia terlibat dalam kehidupan politik karena politik hanya dipahami secara terbatas yaitu perebutan kekuasaan. Secara empirik masyarakat melihat bahwa perebutan kekuasaan selalu “memakan” korban dan senantiasa dipenuhi hiruk pikuk dengan praktek-praktek yang kotor. Realitas tersebut menjadi bahan pengetahuan dan pengalaman masyarakat di dalam memahami politik. Apalagi media mengemas persoalan ini yang juga secara terus menerus disajikan kepada publik. Apa yang dianggap penting oleh media pada gilirannya membuat persepsi publik mengikuti apa yang disajikan media.

Sementara itu pemerintah Orde Baru yang berkuasa hampir 32 tahun melalui berbagai kebijakan telah mampu memberikan persepsi bahwa politik milik elite dan masyarakat hanya menerima kebijakan. Dalam bidang pendidikan pun, sistem dibuat sedemikian rupa agar peserta didik sibuk dengan pelajaran atau kuliah sehingga sangat minim bersinggungan dengan politik. Pemahaman politik mahasiswa lebih diperoleh dari pengalaman praktis dalam berorganisasi yang banyak dari luar kampus

Wacana tentang pendidikan politik mulai muncul kembali setelah tumbanganya Orde Baru. Masyarakat “mulai” lagi secara langsung atau tidak langsung bersinggungan dengan politik. Namun, memori kolektif yang begitu kuat tentang politik menyebabkan wacana pendidikan politik hanya muncul di arena-arena ketika akan terjadi perebutan kekuasaan di berbagai level. Pendidikan politik merupakan sebuah diksi yang kerap disebut terutama menjelang proses pergantian kepemimpinan yang melibatkan masyarakat, mulai dari pemilu legislatif, presiden sampai pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Pendidikan politik bahkan menjadi jargon bagi semua pihak yang berkepentingan dalam proses pergantian pimpinan tadi.

Padahal, pendidikan politik bukan sekedar informasi tentang mekanisme menggunakan hak suara menjelang pemilu, tetapi memahami diri sebagai seorang warga Negara yang ikut bertanggungjawab mengawal

kehidupan yang demokratis. Pendidikan politik pada dasarnya adalah suatu proses pembelajaran politik bagi masyarakat yang akan membentuk kesadaran politik, perilaku politik yang cerdas dan pada gilirannya akan mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat didalamnya.

Pendidikan politik dengan demikian sebagai tempat sandaran penting bagi keberlangsungan masyarakat dan sistem politik yang sedang terancam. Misalnya proses rekrutmen elit politik yang didasarkan pada basis modal ekonomi dan tidak berdasarkan pada kualifikasi dan kompetensi tertentu; politik yang tidak berdasarkan pada pemihakan kepada rakyat, tercerabutnya basis etika politik.

Adapun pendidikan politik, sebagaimana diungkapkan oleh Alfian (dalam Ahdiyana, 2009) merupakan usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik ideal yang hendak dibangun. Soemarno (2002) mengemukakan, pendidikan politik yang dilaksanakan negara bertujuan (1) mempersiapkan generasi penerus sebagai penerima dan pelanjut sistem nilai (sistem politik, pola keyakinan dan sistem budaya), (2) menyamakan sistem berpikir tentang nilai-nilai yang dapat mempedomani aktivitas kehidupan bernegara (3) memantapkan sikap jiwa di dalam melaksanakan sistem nilai-nilai sekaligus membangun hasrat melestarikan sistem nilai.

Pertanyaannya kemudian siapakah yang bertanggung jawab terhadap pendidikan politik ini? Pendidikan politik tidak hanya secara eksplisit disebutkan dalam kurikulum pendidikan formal yaitu sekolah dari berbagai jenjangnya. Namun pendidikan politik dimulai dari keluarga, lingkungan sosialnya, sekolah dan lainnya.

Proses panjang inilah, pada dasarnya masyarakat sudah memiliki *stock of knowledge* sebagai kognisi sosial. Formasi kognisi sosial ini terbentuk dalam kontinum waktu tertentu, terekam, tersimpan, dan tersistematisasi dalam struktur kognitif. Dalam terminologi lain, *stock of knowledge* ini merupakan *tacit knowledge*

sebagai pemahaman dan pengetahuan alam bawah sadar yang perlu didorong keluar sehingga menjadi sesuatu yang manifest atau eksplisit (Adi Suprpto, dkk, 2013)

Interaksi masyarakat dengan masyarakat lainnya dalam kurun waktu tertentu mempunyai pengaruh terhadap pengetahuan-pengetahuan politik. Proses ini dapat pasif dan aktif atau kontinum di antara keduanya. Keingintahuan terhadap pengetahuan, pada umumnya digerakan oleh kebutuhan informasi yang diperlukan di seputar kehidupan mereka. Dengan demikian, proses mengetahui tidak dapat dipandang semata-mata transfer pengetahuan, tanpa memahami level kepentingan dan kebutuhan yang mereka inginkan.

Mereka mendialogkan apa yang mereka perlu ketahui dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah dan mereka miliki. Setiap penerimaan pengetahuan, dapat bersifat *reinforcement*-yakni peneguhan terhadap pengetahuan yang mereka sudah miliki; memperluas pengetahuan, mengisi kekosongan pengetahuan atau mendistorsinya. Namun selama ini, setidaknya sejak gerakan Reformasi bergulir, politik telah disajikan dengan penuh hiruk pikuk dan jauh dari adab serta etika politik yang baik.

Desa Melek Politik

Desa Melek Politik merupakan istilah yang lahir dari praktek-praktek diskursif dari sejumlah pihak sebagai bentuk kepekaan dan rasa tanggung jawab terhadap buruknya persepsi masyarakat terhadap politik, yang bersifat sempit, terbatas dan pesimis. Gagasan pokoknya adalah usaha apa yang dapat dilakukan agar masyarakat melihat politik tidak hanya sebatas cara-cara memberikan suara ketika pemilihan umum, melainkan bentuk partisipasi dalam pembangunan di desa, yang sesungguhnya adalah persoalan politik yang sangat ril.

Dalam Focus Group Discussion (FGD, 24 September 2016) yang dilakukan dengan KPU Kabupaten Sleman bersama dengan peneliti, dihasilkan sejumlah pokok-pokok pemikiran yang menjadi cikal bakal dibentuknya

Desa Melek Politik. Pertama, adanya keinginan bersama, untuk melakukan perubahan terhadap persepsi buruk terhadap politik yang dalam panggung nasional diwarnai dengan perilaku elit politik yang korup dan penuh dengan pencitraan.

Kedua, perubahan ini dilakukan melalui pendidikan politik yang dijalankan oleh komponen masyarakat desa yang bertumpu pada kekuatan pemuda. Pemuda yang ditunjuk atau yang secara sukarela berminat menjadi pemuda pelopor yang kemudian disebut sebagai Vocal Point yang merupakan komunikator dalam proses-proses politik di pedesaan atau dalam proses pendidikan politik di pedesaan.

Ketiga, untuk menopang keberhasilan proses pendidikan politik yang dipelopori oleh para pemuda yang tergabung dalam kelompok Vocal point ini, diperlukan pelatihan yang membekali mereka dengan ketrampilan berkomunikasi, metode penyampaian komunikasi dan pengembangan materi pendidikan politik yang merupakan sumber rujukan dan bekal pengetahuan terhadap politik yang memiliki dimensi dan cakupan yang luas. Materi ini difokuskan pada pembentukan kesadaran diri sebagai warganegara untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan khususnya di desa.

Keempat, karena tujuannya diharapkan menjadi model, maka dirumuskan desa yang memenuhi sejumlah kriteria tertentu, yang antara lain merupakan desa yang penduduknya relatif stabil, tidak merupakan pendatang atau perantau, yang kohesivitas sosialnya masih kuat, dan potensi kepemudaannya yang besar. Atas dasar itu, bekerja sama dengan KPU Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Sleman, Desa Sendangsari merupakan desa yang secara relatif ideal dijadikan model Desa Melek Politik.

Asumsi penting pembentukan Desa Melek Politik ini adalah desa yang masyarakatnya memiliki pengetahuan dan kesadaran diri sebagai warganegara yang berpartisipasi yang tinggi dalam proses-proses pembangunan di pedesaan. Kata Desa merujuk pada entitas wilayah pemerintahan sekaligus memiliki akar kultural

yang luas. Ketercapaian melek politik dalam area atau cakupan desa, sangat tergantung pada posisi dan peran yang dijalankan para pemuda Vocal point dalam proses-proses pembangunan dan pendidikan politik di dalamnya, dukungan pemerintah desa dan pemerintah kabupaten Sleman itu sendiri.

Kelima, untuk kepentingan keberlangsungan pemberdayaan masyarakat, dan kesadaran diri sebagai warganegara yang berpartisipasi dalam pembangunan pedesaan, perlu kebijakan pemerintah desa untuk memasukkan kelompok pemuda Vocal Point ini sebagai bagian dari struktur yang melekat dalam pemerintahan desa yang bersangkutan. Oleh karena itu, dengan terintegrasinya kelompok pemuda Vocal point ini dalam struktur pemerintahan desa, apa yang menjadi tujuan dan program kegiatan Vocal Point mendapatkan dukungan anggaran pemerintah.

Harapan terbentuknya Desa Melek Politik adalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi lebih tertata dan jelas. Seorang narasumber (Hardiman) menyatakan:

Asumsi-asumsi yang tidak terkomunikasikan dengan baik menyebabkan mekanisme yang sebenarnya sudah baik justru bisa menimbulkan masalah baru.”...Untuk musrembang itu memang saya pernah diundang sebagai perwakilan dari karang taruna, di situ memang kita diminta pemikirannya untuk kegiatan-kegiatan yang terkait kepemudaan. Nanti yang diajukan itu apa, dari program-program itu bisa mengakses kesana. Akan tetapi, memang kalau kita lihat, sepemikiran saya sendiri. “ ... ada kalanya perwakilan hanya formalitas yang penting ada. Misalnya, perwakilan dari pemuda hanya segelintir orang, statusnya yang penting ada wakilnya. (Wawancara, 8 September 2016)

Rumusan tersebut menjadi kerangka

kerja bersama. KPU Kabupaten Sleman mengidentifikasi dan memastikan desa mana yang tepat, relevan dan bernilai manfaat tinggi bagi model pembentukan Desa Melek Politik. Sedangkan peneliti merumuskan segi dan persiapan yang berkaitan dengan pelatihan bagi kelompok pemuda Vocal point yang akan menjadi komunikator-penyampai pesan pendidikan politik, isi atau materi yang akan disampaikan serta menjadi bekal pengetahuan dasar dalam proses-proses pendidikan politik dan proses-proses pembangunan desa.

Dalam perkembangannya, rintisan pembentukan Desa Melek Politik ini melibatkan Kepala Desa Sendangsari sebagai Desa terpilih bagi pembentukan Desa Melek Politik, Karangtaruna yang ada di desa tersebut, dan Pemerintah Kabupaten. Ketika rumusan ini dibicarakan bersama, terbentuklah cikal bakal kelompok pemuda Vocal point sebanyak 16 orang yang bersedia dan sukarela menjadi bagian dari Vocal point di Desa Sendangsari Kabupaten Sleman tersebut. Penyebutan nama Desa Melek Politik merupakan istilah yang dimaksudkan untuk menggambarkan desa yang memiliki kesadaran politik yang tinggi dalam proses-proses pembangunan di pedesaan.

Vocal Point: Komunikator Transformatif Desa Melek Politik

Sebagai tumpuan bagi perubahan dan mendorong partisipasi politik masyarakat, maka diperlukan tenaga penggerak atau kader pemuda yang akan melakukan proses pendidikan dan penyampaian pesan yang berkaitan dengan kesadaran dan kepedulian terhadap pembangunan di pedesaan. Sebagaimana telah disinggung, pembentukan Desa Melek Politik disertai terbentuknya kelompok pemuda Vocal Point.

Mereka adalah sekelompok pemuda yang dipersiapkan sebagai komunikator dalam proses pembangunan. Salah satu pandangan dari peserta FGD mengatakan bahwa pemuda memang hal yang pokok dalam pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Pemuda kalau ia diberi kesempatan dan kepercayaan, kegiatan itu akan

jalan. Pada umumnya yang generasi tua sering tidak percaya. Pemuda perlu diberi kepercayaan dan kesempatan, maka kepercayaan itu akan berjalan dengan baik.

Dari perekrutan, ada 16 yang bersedia menjadi Vocal Point, 12 diantaranya adalah laki-laki dan 4 adalah perempuan. Rata-rata dari mereka berusia 32 tahun. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda antara lain wiraswasta, guru honorer, perangkat desa dan mahasiswa. Perbedaan sosiologis ini membuat kelompok ini memerlukan waktu untuk memahami dan menyatukan diri sebagai kelompok kader Vocal Point.

Sejak awal telah dimaksud bahwa Vocal Point dibentuk sebagai komunikator dalam pendidikan politik dan pembangunan, dapat dikembangkan berdasarkan pada prinsip kompetensi dan kualifikasi komunikasi. Oleh karena itu, mereka dilatih dan dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan berkomunikasi yang berkompeten. Ada tiga hal penting yang dipersiapkan dalam pengembangan kompetensi dan kualifikasi Vocal Point sebagai komunikator, yakni pengembangan dan kompetensi yang berkaitan dan intelektualitas, pengembangan karakter dan pengembangan yang berkaitan dengan tanggungjawab dan ketulusan.

Pengembangan intelektualitas tidak hanya pada penguasaan materi yang telah disiapkan yang merupakan outline atau garis-garis besar materi pokok yang nantinya digunakan dalam proses pendidikan politik dan proses pembangunan di pedesaan, melainkan pengembangan ini juga mencakup diskusi-diskusi intensif terhadap berbagai kasus dan permasalahan yang ada. Intelektualitas ini mencakup segi kognitif, pengalaman, kemampuan dalam menganalisis permasalahan, kemampuan mensintesis permasalahan dan kemampuan menggunakan pesan-pesan komunikasi yang tepat dan yang mudah dimengerti.

Selama penelitian partisipatif dilakukan ada dua desain pesan yang dihasilkan yakni modul dan buku panduan. Modul dan buku panduan dikemas bagi pengembangan kualifikasi dan

kompetensi komunikasi. Sebelum kelompok pemuda Vocal Point ini terjun ke masyarakat dan menjadi pemuda pelopor bagi pendidikan politik di pedesaan, mereka memiliki “platform” terhadap materi, strategi dan kemampuan dasar dalam berkomunikasi.

Konsep pengembangan materi mencakup pengertian politik, yang digambarkan tidak terbatas pada persoalan perebutan kekuasaan, melainkan digambarkan secara sederhana, mencakup pengambilan keputusan, strategi dalam melaksanakan program-program pembangunan, pengelolaan sumber daya alam dan manusia, termasuk menjelaskan sifat dasar manusia sebagai makhluk politik.

Kesadaran diri sebagai warganegara tercermin pada pengenalan terhadap Hukum Dasar Negara atau Konstitusi, Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara, cita-cita kebangsaan bangsa Indonesia, dan bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat yang luas. Jadi, pengembangan pesan dalam pendidikan politik yang dibekalkan kepada Vocal Point Desa Sendangsari Kabupaten Sleman itu, merupakan materi pokok yang diarahkan pada pembentukan diri sebagai warganegara.

Pengembangan karakter ditujukan untuk membangun pemahaman bahwa sebagai komunikator yang terjun dalam proses pendidikan politik dan pembangunan desa, unsur kepercayaan masyarakat terhadap komunikator merupakan salah satu kunci keberhasilan. Keberhasilan pendidikan dapat dilihat pada seberapa besar perubahan perilaku itu terjadi ke arah yang lebih baik dan yang diinginkan.

Konsolidasi dan persiapan mereka diujikan dalam pertemuan-pertemuan. Masing-masing diberi kesempatan untuk menyampaikan pemikiran dan pendapatnya tentang model penyampaian yang paling tepat. Sebagai Vocal Point, mereka secara kultural memiliki kedekatan dengan masyarakat yang sedikit banyak, mereka telah kenal. Dari sejumlah model pendekatan penyampaian itu muncul ide-ide tertentu seperti model sosiodrama, diskusi, ceramah, dan presentasi.

Dalam proses pembangunan pedesaan, Vocal Point diarahkan pada pemahaman bahwa masyarakat adalah subyek pembangunan bukan obyek pembangunan. Masyarakat harus dilibatkan mulai dari perencanaan hingga evaluasi program. Masyarakat akan ikut memiliki dan memelihara semua program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Mekanisme atau alur perencanaan pembangunan desa memang telah melibatkan masyarakat melalui musyawarah pembangunan desa. Semua elemen masyarakat terlibat. Namun sebagai wakil dari organisasi atau kelompok masyarakat mereka tidak menjangkau aspirasi dari kelompok yang diwakili sehingga ketika program disetujui dan akan dijalankan tidak mendapatkan respon. Akibatnya kelompok yang diwakili sering mengajukan komplain karena merasa tidak pernah dilibatkan dalam menyusun program.

Upaya mematangkan peran mereka, selain dilakukan pelatihan secara bertahap, juga mengikutsertakan dalam forum-forum resmi pemerintahan. Betapapun kualitas kader Vocal Point, tetapi jika tidak bersinergi dengan kebijakan dan program-program pembangunan pemerintah khususnya pemerintah desa, kegunaan fungsional ini tidak akan maksimal. Oleh karena itu, keberlanjutan posisi dan peran Vocal Point tidak hanya berhenti pada saat pendeklarasian saja. Vocal Point ini merupakan instrumen baru sebagai komunikator politik yang dapat didayagunakan bagi kepentingan-kepentingan pembangunan pedesaan.

Jaminan yang bersifat kebijakan telah diupayakan sehingga keberadaan Vocal Point ini diketahui dan didengar tidak hanya oleh kepala desa, tetapi juga diketahui oleh KPU Pusat Jakarta dan personil inti dalam pemerintahan kabupaten Sleman yang berkaitan dengan pendidikan politik masyarakat. Pada saat peluncuran Desa Melek Politik di desa Sendangsari Kabupaten Sleman, hadir salah satu komisioner KPU Pusat, Wakil Bupati Kabupaten Sleman, Kepala Desa Sendangsari, semua kelompok pemuda Vocal Point, tokoh-tokoh masyarakat, Muspika dan tim

peneliti yang mengeloborasikan berdirinya Desa Melek Politik dan perwakilan dari universitas.

Kemampuan kelompok pemuda Vocal Point sebagai komunikator dalam pembangunan, dikembangkan melalui proses-proses kebersamaan antara peneliti, pemangku kebijakan dan tokoh-tokoh masyarakat. Penting artinya bagi kelompok pemuda Vocal Point, bahwa keberhasilan komunikasi yang efektif dalam melakukan perubahan bagi masyarakat, ditentukan oleh tiga faktor utama, yakni posisi mereka sebagai komunikator yang kredibel, kemampuan mereka dalam membangun dan memproduksi pesan dan pemahaman mereka terhadap peserta didik yang dihadapi yang mencakup dimensi sosial dan psikologis.

Diskusi, presentasi, ceramah, menulis, dan identifikasi terhadap karakteristik audience menjadi bagian simulasi yang mematangkan keberadaan mereka sehingga kelompok Vocal Point ini diserahterimakan kepada pemerintah desa. Semua bentuk kegiatan adakalanya digunakan untuk menentukan topik pembicaraan. Apa yang menjadi topik dari setiap pembicaraan dan penyampaian merupakan hasil penggalian dan pemikiran mendalam. Sekali topik atau ide yang ingin disampaikan, ide ini dikembangkan dengan bahan-bahan, bukti-bukti yang menarik dan hal-hal lain yang mendukung gagasan yang ingin disampaikan.

Penggalian ide dan gagasan menjadi acuan paling penting dan utama, bagi setiap komunikator ketika ia ingin memulai pembicaraan. Hal yang demikian ini, menjadi *bottom line* atau semacam prinsip pertama bagi Vocal Point ketika ingin menyampaikan pesan pendidikan dan pembangunan di pedesaan. Pada tahap berikutnya, baru memikirkan bagaimana tata urutan dari gagasan dan ide itu disampaikan.

Dalam banyak diskusi yang dilakukan bersama, tata urutan ini memiliki variasi. Ada yang ingin mengembangkan penyampaian ide berangkat dari pertanyaan-pertanyaan, masuk sebagai pengantar, isi dan substansi ide, dan diakhiri dengan penutup. Tata urutan itu bersifat

memudahkan agar setiap komunikator dapat membedakan mana yang merupakan pengantar, isi dan penutup. Apapun cara yang ingin dikembangkan, Vocal Point dibekali pemahaman bahwa tata urutan penyampaian terhadap suatu gagasan merupakan syarat teknis dasar bagi keberhasilan komunikasi.

Adapun gaya penyampaian dan cara penyampaian termasuk kemampuan mengingat semua materi yang menjadi topik atau gagasan yang ingin disampaikan merupakan faktor-faktor yang penting dalam teknik-teknik berkomunikasi termasuk dalam proses pendidikan politik di pedesaan yang dilakukan oleh Vocal Point di desa Sendangsari Kabupaten Sleman.

Inilah gagasan yang menjadi dasar terbentuknya Desa Melek Politik yang diikuti terbentuknya Kelompok Kader Pemuda Vocal Point. Kedudukan Vocal Point merupakan struktur baru bagi struktur pemerintahan desa khususnya bagi pemerintahan desa Sendangsari Kabupaten Sleman. Penelitian ini hanya menghasilkan terbentuknya cikal bakal Desa Melek Politik yang ditandai dengan berdirinya kelompok kader pemuda Vocal Point yang akan menjadi komunikator pembangunan, komunikator politik dan komunikator yang transformatif dalam proses-proses pendidikan dan pembangunan pedesaan.

Simpulan

Sebagai penelitian yang berbasis *action research* keberhasilannya terlihat dari banyak pihak yang terlibat dan termotivasi untuk mewujudkan bentuk partisipasi politik yang luas dalam proses-proses pendidikan dan pembangunan di pedesaan. Dorongan untuk mewujudkan Desa Melek Politik dan Vocal Point sebagai Komunikator Pembangunan dan Komunikator Politik dalam pendidikan politik sesungguhnya bukan sebagai ide murni dari peneliti, melainkan ide kolektif seperti KPU Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Desa Sendangsari, KPU Pusat, Tokoh-tokoh masyarakat, Karangtaruna dan elemen-elemen lain yang melihat politik

sebagai sesuatu yang dipersepsikan secara sempit, kotor dan tidak mendidik.

Ada keinginan bersama untuk melakukan perubahan-perubahan kecil di tingkat desa, yakni bagaimana pendidikan politik, tidak semata-mata diarahkan sebagai perebutan kekuasaan, melainkan sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan, proses pengambilan keputusan, pengawasan dalam program-program pembangunan dan kesadaran diri sebagai warganegara.

Keinginan ini yang kemudian mendorong semua pihak untuk mewujudkan Desa Melek Politik, suatu gambaran tentang desa yang ideal terhadap politik. Dalam arti, desa yang masyarakatnya memiliki kesadaran tinggi sebagai warganegara yang membedakan dengan desa-desa yang lain dalam mensikapi persoalan-persoalan politik yang semata-mata didasarkan pada transaksional. Idealisme ini bertumpu pada keberhasilan peran Vocal Point yakni sebagai kelompok pemuda pelopor yang menjadi komunikator pembangunan, komunikator dalam proses-proses pendidikan di pedesaan.

Persoalannya adalah implikasi dari terbentuknya Desa Melek Politik dan Kelompok Pemuda Vocal Point, diperlukan kebijakan lebih lanjut agar asumsi-asumsi yang telah dibangun selama ini, tetap dilanjutkan dan dikuatkan dengan ketetapan yang mengikat keberadaan mereka dengan program-program pembangunan di pedesaan itu. Tanpa political will dan pendampingan lebih lanjut khususnya dari KPU Kabupaten Sleman, maksimalisasi peran mereka seiring dengan berjalannya waktu dapat terdegradasi.

Daftar Pustaka

Azra, Azyumardi, 2006, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Kompas

De Roux, G.I, " Together against the Computer, In O.Fals Bords and M.A Rahman, 1991, *Action and Knowledge: Breaking the Monopoly with participatory Actions Research*,

New York: Intermediate Technology

Planalp, Sally and Fitness, Julie, " Interpersonal Communication Ethic, " in George Cheney, Steve May, and Debashish Munshi, 2011, *The Handbook of Communication Ethics*, Madison: Routledge

Nugrahajati, Susilastuti Dwi, Suparno, Basuki Agus, Soeprapto, Adi, 2014, *Pengembangan Model Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula*, unpublished Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta

Reason, Peter, "Three Approaches to Participative Inquiry," in Norman K Denzin and Yvonna S Lincoln, 1994, *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publication

Subakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia

Sumarno, AP, 2002, *Komunikasi Politik*, Jakarta: Universitas Terbuka

Suparno, Basuki Agus, dan Dwinugrahajati, Susilastuti, 2015, *Kualitas Partisipasi Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Kulon Progo*, unpublished, Yogyakarta: Kerjasama Jurusan Ilmu Komunikasi dan KPU Kabupate Kulon Progo

Syafe'i, Imam, 2006, *Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Kritis, Komunitas, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 2, Nomor 1, Juni hal.12.

Tancred-H.C Lawson, 1991, *Aristotle The Art of Rhetoric*, London: Penguin Books

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional